

**Corporate Governance,  
Environmental Disclosure, dan Kepemilikan Keluarga**  
(Studi empiris industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

**Rudi Zulfikar**

*Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*

**Tenny Badina**

*Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*

**Meilasari Setya Arum**

*Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*

**ABSTRACT**

*The objective of this study is to examine : (1) the impact of corporate governance on environmental disclosure (2) the impact of corporate governance on environmental disclosure with family ownership as the moderating variable. The sampel of this study consist of 84 observations from manufactur company which listed in Indonesia Stock Exchange from 2011 to 2013. Multiple regression analysis is used to test the hypothesis in this research. The result of this study show that the impact of corporate governance has significant influence toward environmental disclosure. But, family ownership as the moderating variable inrelation between corporate governance and environmental disclosure has not significant influence.*

**Keywords** : *corporate governance, enviromental disclosure, kepemilikan keluarga*

**PENDAHULUAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate governance* terhadap *environmental disclosure (ED)* dengan kepemilikan keluarga sebagai variable moderasi pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Pengujian dilakukan atas adanya pengaruh *corporate governance* terhadap *environmental disclosure* pada perusahaan yang dipengaruhi oleh kepemilikan keluarga. Hal ini dikarenakan Indonesia mengalami permasalahan pencemaran lingkungan hidup, hal tersebut dibuktikan Indonesia sebagai negara urutan keempat penyumbang emisi energi kotor di tanah air dan kegiatan ekspor komoditas (solopos.com, 2013). Sementara itu investor lebih tertarik pada perusahaan yang menerapkan manajemen lingkungan hidup yang baik dan tidak mengabaikan masalah lingkungan hidup (Ja'far, 2006).

Kepentingan bisnis yang menunjukkan reputasi, kredibilitas, dan *value added* perusahaan bagi *stakeholder* menjadi dorongan perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan hidup dalam *annual report* (Eipstein dan Freedman, 1994). Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mewajibkan setiap perseroan yang berkaitan dengan dan/atau sumber daya alam melaksanakan kegiatan tanggung jawab social dan lingkungan.

Beberapa kasus di Indonsia yang berkaitan dengan lingkungan hidup antara lain di indikasikan melakukan pencemaran lingkungan yaitu PT. Cussons Indonesia berlokasi di kota Tangerang, pencemaran terjadi karena perusahaan membuang limbah B3 kedalam sungai mengakibatkan terjadinya pencemaran sehingga masyarakat tidak dapat memanfaatkan sungai dengan baik (Merdeka.com, 2013). Selanjutnya, PT. Usaha Loka dan PT. Kasin mencemari

kali Badek di Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun di kota Malang (Tempo, 2014). PT. Dongjin di Cilegon Banten melakukan aktivitas pembuangan limbah *bottom ash*, limbah yang mengakibatkan laut disekitar mengalami pencemaran dan menyebabkan bau yang sangat menyengat (Kabarbanten.com, 2013). Selanjutnya, PT. Indah Kiat Pulp & Paper (IKPP) di Kragilan kabupaten Serang yang mencemari sungai Ciujung (Suarapembaharuan.com, 2012).

Beberapa kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak perusahaan yang melakukan aktifitas nya tidak memperdulikan lingkungannya hal ini diakibatkan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak yang berkepentingan lainnya. Hal ini bisa mengakibatkan terjadinya bencana yang bisa merugikan masyarakat. Dengan demikian diperlukan suatu pengawasan dengan cara menginformasikan kepada masyarakat tentang pengelolaan perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Salah satu informasi yang diungkapkan yaitu *enviromnetal disclosure*.

*Environmental disclosure* penting untuk dilakukan karena melalui *environmental disclosure* pada laporan tahunan perusahaan, masyarakat dapat memantau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi tanggung jawab sosialnya. Dengan demikian, perusahaan akan memperoleh manfaat positif yaitu perhatian, kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Selanjutnya, *environmental disclosure* dapat membantu perusahaan dalam mengatasi masalah permodalan dari *stakeholders* maupun *investor* (Brown dan Deegan, 1998).

Tsui dan Gul (2000) mengatakan bahwa *corporate governance* berperan meningkatkan transparansi perusahaan. *corporate governance* yang baik menjadi salah satu factor pendorong yang memunculkan akuntansi pertanggung jawaban lingkungan hidup (Eng dan Mak, 2003). Apabila *corporate governance* dalam sebuah negara khususnya Indonesia masih rendah maka *environmental disclosure* perusahaan juga rendah dan begitu pula sebaliknya, hal ini sejalan dengan penelitian Katiya dan Agus (2011) bahwa Semakin baik *corporate governance* perusahaan, semakin tinggi pula *environmental disclosure* yang dilakukan

Dengan melakukan pengawasan yang diarahkan pada perilaku manajer agar bisa dinilai apakah tindakannya bermanfaat bagi perusahaan (pemilik) atau bagi manajer sendiri (Khomsiyah, 2005). Bentuk pengawasan yang dilakukan akan menghasilkan tranparansi dalam pengelolaan perusahaan, *Corporate governance* merupakan upaya untuk mencari cara terbaik dalam menjalankan perusahaan, dimana kebijakan dan peraturan yang ada dalam *corporate governance* dapat digunakan untuk mengontrol manajemen suatu perusahaan. Dengan melakukan pengawasan yang diarahkan pada perilaku manajer agar bias dinilai apakah tindakannya bermanfaat bagi perusahaan (pemilik) atau bagi manajer sendiri (Khomsiyah, 2005).

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan *corporate governance* dan *environmental disclosure* antara lain oleh Suhardjanto (2010) menyimpulkan bahwa rerata perusahaan sampel di Indonesia melaksanakan pengungkapan lingkungan sebesar 47,78%, rerata tersebut menunjukkan tingkat pengungkapan masih rendah. Penelitian lainnya, Cong dan Freedman (2011) membuktikan terdapat hubungan positif antara *corporate governance* dengan *environmental disclosure* ditahun awal penetapan SOX. Selanjutnya, menurut Juhmani (2013) *corporate governance* mempengaruhi pengungkapan sukarela perusahaan, sebagai antisipasi terhadap asimetri informasi antara manajemen dan investor dan biaya agensi yang dihasilkan. Calon investor akan lebih tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan yang memiliki *corporate governance* yang baik serta melakukan berbagai pengungkapan, salah satunya *environmental disclosure*.

Di Indonesia, indeks penerapan *corporate governance* dikembangkan oleh IICG, yang menggunakan tujuh dimensi yaitu: komitmen, dewan komisaris, dewan direksi, komite fungsional, hak pemegang saham, transparansi, dan responsibilitas. Ke tujuh dimensi tersebut

mencerminkan empat prinsip *corporate governance* yaitu: akuntabilitas, tanggung jawab, *fairness*, transparansi, dan komitmen menjalankan ke empat prinsip *corporate governance* tersebut (Khomsiyah, 2005).

Dengan demikian, instrument indeks *corporate governance* disusun berdasarkan penjabaran prinsip-prinsip *corporate governance* kedalam subvariabel/dimensi yang membentuk prinsip-prinsip *corporate governance* dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, yaitu: UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 8 Tahun 1998 tentang Pasar Modal, dan panduan penerapan *corporate governance* yang direkomendasikan Komite Nasional *corporate governance*. Lima dimensi penerapan *corporate governance*, yaitu komitmen, akuntabilitas, tanggung jawab, *fairness*, dan transparansi dijabarkan menjadi 7 (tujuh) dimensi, yaitu: komitmen, dewan komisaris, dewan direksi, komite fungsional, hak pemegang saham, transparansi, dan tanggung jawab. (Khomsiyah, 2005).

Struktur kepemilikan saham dalam suatu negara ditentukan oleh kuat atau lemahnya perlindungan negara terhadap pemegang saham (La porta *et al.*, 1996). Negara dengan perlindungan hukum sangat baik terhadap pemegang saham, biasanya bentuk struktur kepemilikannya menyebar. Sedangkan negara dengan perlindungan kurang baik terhadap pemegang saham, biasanya bentuk struktur kepemilikannya terkonsentrasi. Di Negara-negara Asia termasuk Indonesia, mayoritas kepemilikan saham terkonsentrasi dengan jumlah kepemilikan saham yang besar (Zhuang *et al.*, 2000). Pendapat tersebut didukung oleh Lukviarman (2006) membuktikan bahwa di Indonesia bentuk kepemilikan saham di Indonesia mayoritas dimiliki oleh keluarga. Hal ini akan mengakibatkan benturan kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, sehingga pemilik mayoritas mempunyai kesempatan untuk menekan hak-hak pemilik minoritas (Mitton, 2002). Selain itu pemilik mayoritas cenderung membuat kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingannya sementara kepentingan tersebut merugikan pemilik minoritas (Claessens *et al.*, 2000).

Kepemilikan keluarga merupakan kepemilikan terkonsentrasi yang banyak terdapat di perusahaan publik di Indonesia. Suatu perusahaan dikatakan sebagai perusahaan berkepemilikan keluarga apabila pendiri atau anggota keluarganya melanjutkan posisi sebagai pemegang dalam manajemen puncak, atau termaksud sebagai anggota *board*, atau juga apabila anggota keluarga tercatat sebagai mayoritas pemilik saham dalam suatu perusahaan (Anderson, dan Reeb, 2003). Claessens, Djankovic dan Lang (2000), lebih dari dua pertiga perusahaan publik di Indonesia dimiliki oleh sejumlah anggota keluarga. sejalan dengan penelitian yang dilakukan Susanto (2007) bahwa 88 persen perusahaan besar di Indonesia merupakan perusahaan keluarga. Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi menimbulkan potensi pada pemegang saham pengendali untuk terlibat jauh dalam pengelolaan perusahaan, serta memperoleh kekuasaan dan *insentif* untuk dapat bernegosiasi dan mendorong kontrak perusahaan dengan para *stakeholders* (Dinaty, Rossieta dan Veronica, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Katiya dan Agus (2011) bahwa Semakin baik penerapan *corporate governance* perusahaan, semakin tinggi pula *environmental disclosure* perusahaan di Indonesia. Akan tetapi dengan karakteristik kepemilikan di Indonesia yang di dimiliki oleh keluarga maka interaksi kepemilikan keluarga dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan yang cenderung menguntungkan pemilik mayoritas. Dengan demikian kepemilikan keluarga diprediksi dapat memperlemah pengaruh *corporate governance* terhadap *environmental disclosure*.

## LANDASAN TEORI

### Teori Legitimasi

Teori legitimasi dilandasi oleh adanya suatu kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat, dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi (Ghozali dan Chariri, 2007). Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan mencari cara untuk menjamin operasi mereka berada dalam batas dan norma yang berlaku di masyarakat (Deegan, 2004). Menurut Deegan (2004), dalam perspektif teori legitimasi, suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktifitasnya jika manajemen menganggap bahwa hal ini adalah yang diharapkan komunitas. Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa bentuk eksplisit dari kontrak sosial adalah persyaratan legal, sementara bentuk implisitnya adalah harapan masyarakat yang tidak tercantum dalam peraturan legal. Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat.

Teori legitimasi menjelaskan bahwa sebuah organisasi dalam melakukan kegiatan operasionalnya harus menunjukkan perilaku yang konsisten dengan nilai sosial (Guthrie dan Parker, 1989). Pengungkapan aktivitas pengungkapan lingkungan hidup dianggap sebagai salah satu hal yang penting untuk mempengaruhi persepsi masyarakat akan kegiatan operasional perusahaan.

Organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai yang melekat pada kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem sosial masyarakat dimana organisasi adalah bagian dari sistem tersebut. Selama kedua hal tersebut selaras, hal tersebut dinamakan legitimasi perusahaan. Ketika terjadi ketidak selarasan antara kedua sistem tersebut, maka akan ada ancaman terhadap legitimasi perusahaan. Dalam posisi sebagai bagian dari masyarakat, operasi perusahaan seringkali mempengaruhi masyarakat sekitarnya. Eksistensinya dapat diterima sebagai anggota masyarakat, sebaliknya eksistensinya pun dapat terancam bila perusahaan tidak menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut atau bahkan merugikan anggota komunitas tersebut. Oleh karena itu, perusahaan melalui manajemennya mencoba memperoleh kesesuaian antara tindakan organisasi dan nilai-nilai dalam masyarakat umum dan publik yang relevan atau stakeholder-nya.

Dowling dan Pfeffer (1975) menyatakan bahwa aktivitas organisasi perusahaan hendaknya sesuai dengan nilai sosial lingkungannya. Lebih lanjut dinyatakan, bahwa terdapat dua dimensi agar perusahaan memperoleh dukungan legitimasi, yaitu: (1) aktivitas organisasi perusahaan harus sesuai dengan sistem nilai di masyarakat; (2) pelaporan aktivitas perusahaan juga hendaknya mencerminkan nilai sosial.

Teori legitimasi juga dapat digunakan untuk menjelaskan keterkaitan *corporate governance* dan kepemilikan keluarga terhadap *environmental disclosure*. Mekanisme *corporate governance* memberikan keyakinan perusahaan untuk melakukan *environmental disclosure*. Artinya, dengan mekanisme *corporate governance* yang mencukupi, perusahaan tetap akan mendapat keuntungan positif, yaitu mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

### ***Corporate Governance dan environmental disclosure***

Hui dan Bowrey (2008) menyarankan bahwa organisasi perlu mengungkapkan kinerja lingkungan mereka dalam berbagai komponen untuk mendapatkan reaksi positif dari lingkungan dan mendapatkan legitimasi masyarakat atas keberadaan dan usaha perusahaan. Anggraini (2006) mengatakan pencemaran lingkungan akibat dari aktivitas yang dilakukan perusahaan, menimbulkan tekanan dari berbagai pihak khususnya masyarakat terhadap perusahaan agar perusahaan memberikan informasi yang transparan mengenai aktivitas lingkungannya didalam laporan tahunan perusahaan. Handajani *et al.*, (2010) mekanisme *corporate governance* perlu ditingkatkan sebagai upaya untuk dapat mengendalikan

aspek negatif dari kegiatan *environmental disclosure* bagi masyarakat, seperti kecurangan perusahaan, pelanggaran peraturan dan hukum, dan ketidakpatuhan terhadap norma sosial.

Pembuktian Katiya dan Agus (2011) menyimpulkan penerapan *corporate governance* yang baik semakin tinggi pula pengungkapan lingkungan yang dilakukan. Hal tersebut sependapat dengan Latridis (2012) Perusahaan yang melaporkan kualitas *environmental disclosure* yang lebih tinggi cenderung untuk menampilkan *corporate governance* yang efektif. Pembuktian lainnya oleh Cong dan Freedman (2011) mengatakan terdapat hubungan positif antara *corporate governance* dan *environmental disclosure*.

**H1: *Corporate governance* berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*.**

### ***Corporate Governance, environmental disclosure, dan kepemilikan keluarga.***

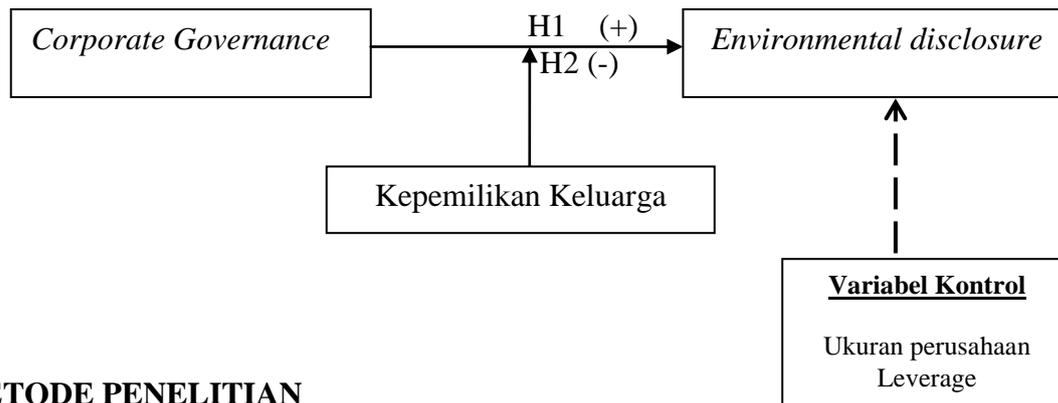
Menurut Ward dan Aronoff (2002) dalam perusahaan keluarga dua atau lebih anggota keluarga dimana posisi penting dipegang oleh anggota keluarga dengan kemampuan untuk mempengaruhi strategi perusahaan dan diteruskan turun temurun kepada generasi berikutnya. Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi menimbulkan potensi pada pemegang saham pengendali untuk terlibat jauh dalam pengelolaan perusahaan, serta memperoleh kekuasaan dan insentif untuk dapat bernegosiasi dan mendorong kontrak perusahaan dengan para *stakeholders* (Dyanty *et al.*, 2012).

Struktur kepemilikan keluarga memiliki insentif yang lebih besar dalam melakukan pengawasan, pemantauan, dan pengontrolan terhadap aktifitas manajerial perusahaan (Anderson *et al.*, 2002; Shleifer dan Vishny, 1986), dimana salah satu cara yang dilakukan adalah memilih anggota keluarganya sendiri untuk mengelola perusahaannya tersebut. Dalam perusahaan keluarga hak kepemilikan yang signifikan atas saham dan kontrol akan dewan direksi perusahaan mempengaruhi hak suara mereka, sehingga hal ini akan menimbulkan dewan direksi tersebut kurang independen dan di dominasi oleh anggota keluarga (Anderson dan Reeb, 2003; Anderson dan Reeb, 2004). Kontrol ini memberikan kesempatan bagi keluarga untuk mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan pemegang saham lainnya.

*Corporate governance* di Asia tahun 2010, diketahui bahwa skor Indonesia adalah 40 yang merupakan peringkat dua terbawah. Artinya, penerapan *corporate governance* di Indonesia masih rendah. salah satu indikasi buruknya praktik *corporate governance* di Indonesia adalah struktur kepemilikan yang masih didominasi keluarga sehingga perlindungan terhadap investor kecil masih lemah (Kurniawan dan Indriantoro, 2000). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan La Porta dkk. (1998, 1999 dan 2000) menemukan bahwa struktur kepemilikan yang terkonsentrasi terjadi di negara dengan tingkat *corporate governance* yang rendah. Hal ini pula yang mengakibatkan rendahnya pengungkapan sukarela perusahaan keluarga.

**H2: *Kepemilikan keluarga* dapat memperlemah pengaruh *corporate governance* terhadap *environmental disclosure*.**

**SKEMA KONSEPTUAL PENELITIAN**



**METODE PENELITIAN**

**Penentuan sampel**

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang *representative* sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

Populasi dalam penelitian ini adalah 133 perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013. Alasan memilih perusahaan manufaktur adalah karena berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mewajibkan setiap perseroan yang berkaitan dengan dan/atau sumber daya alam melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selanjutnya, berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mewajibkan setiap penanam modal melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (pasal 15 b).

Selain itu berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mewajibkan setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup untuk memiliki Amdal (pasal 22 ayat 1). Maka, peneliti berargumen bahwa perusahaan manufaktur merupakan satu diantara perusahaan yang dimaksudkan dalam UU tersebut dan adanya indikasi *environmental disclosure* di sektor manufaktur pada tahun 2011-2013.

**Pengukuran Variabel**

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *corporate governance* sebagai variabel independen, *environmental disclosure* sebagai variabel dependen, kepemilikan keluarga sebagai variabel moderasi, dan ukuran perusahaan serta *leverage* sebagai variabel kontrol.

**Variabel Independen**

Variabel indeks *corporate governance* merupakan variabel independen yang diukur menggunakan tujuh dimensi yaitu: komitmen, dewan komisaris, dewan direksi, komite fungsional, hak pemegang saham, transparansi, dan tanggung jawab sosial (Khomsiyah, 2005). Ke tujuh dimensi tersebut mencerminkan empat prinsip *corporate governance* yaitu: akuntabilitas, tanggung jawab sosial, *fairness*, transparansi, dan komitmen menjalankan ke empat prinsip *corporate governance* tersebut (Khomsiyah, 2005).

Dengan demikian instrumen indeks *corporate governance* disusun berdasarkan penjabaran prinsip *corporate governance* ke dalam subvariabel/dimensi yang membentuk prinsip *corporate governance* dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, yaitu: UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 8 Tahun 1998 tentang Pasar Modal, dan panduan penerapan *corporate governance* yang direkomendasikan Komite Nasional *Corporate Governance*. *Corporate governance* diukur menggunakan Indeks.

## Variabel Dependen

Variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah *environmental disclosure*. Pengukuran *environmental disclosure* menggunakan metode *weighted index* yaitu menggunakan item *environmental disclosure*. Indeks *environmental disclosure* yang terdapat dalam *Global Reporting Initiative 2007* (GRI 2007). Penelitian yang dilakukan oleh Tampubolon (2008) dan Qorrina (2010). Mereka melakukan perhitungan luas pengungkapan lingkungan dengan menggunakan variabel dummy yaitu :

Score 0: apabila perusahaan tidak mengungkapkan item indeks pengungkapan. Score 1: apabila perusahaan mengungkapkan item indeks pengungkapan.

Data sumber *environmental disclosure* berasal dari laporan tahunan perusahaan. Setiap perusahaan memiliki kebijakan tersendiri untuk melakukan *environmental disclosure* dalam laporan yang diterbitkannya. Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan. Informasi lingkungan yang disajikan oleh perusahaan berada pada sub bagian yang berbeda dalam laporan tahunan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Informasi lingkungan dalam laporan tahunan biasanya dapat ditemui di sub bagian keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3L), program bina lingkungan, dan lain-lain.

*Environmental disclosure* yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan sumber pengungkapan dibagi dengan jumlah pengungkapan yang seharusnya dilakukan (total pengungkapan lingkungan berdasarkan indeks pengungkapan lingkungan)

## Variabel Moderasi

Menurut La Porta, dan Lopez, Shleifer (1999) kepemilikan keluarga didefinisikan sebagai kepemilikan dari individu dan kepemilikan dari perusahaan tertutup (di atas 5%), yang bukan perusahaan publik, negara, ataupun institusi keuangan. Penelitian ini menggunakan persentase kepemilikan keluarga dalam struktur saham perusahaan, seperti yang digunakan oleh Anderson, Mansi, dan Reeb (2002) dan Ayub (2008).

KKK= Jumlah kepemilikan saham lebih

## Ukuran Perusahaan (*Size*)

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: log total aktiva (Marihhot dan Doddy, 2007), log total penjualan (Nuryaman, 2008), kapitalisasi pasar (Halim, dkk. 2005). Machfoedz (1994) dalam Mardiyah (2001) menjelaskan bahwa pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firms*), perusahaan sedang (*medium firms*), perusahaan kecil (*small firms*). Penentuan ukuran perusahaan ini adalah berdasarkan kepada total aktiva perusahaan.

$$SIZE = \log n \text{ Total Aktiva}$$

## Leverage

Penelitian ini konsisten dengan pengukuran yang digunakan oleh freedman jaggi (2005) yaitu membandingkan total utang dengan total ekuitas. Rumus yang digunakan untuk menghitung leverage adalah

$$\text{Leverage} = \text{Total Hutang} / \text{Total Equity}$$

**Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa regresi berganda. Analisis statistik *inferensial* yang digunakan adalah analisis regresi dengan variabel moderating/ *Moderated Regression Analysis (MRA)* (Ghozali, 2011). Prosedur analisis data dilakukan dengan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan data dan memeriksa ada tidaknya outlier. Selain itu, penggunaan regresi berganda mensyaratkan dilakukannya uji asumsi klasik, oleh karena itu tahap berikutnya adalah melakukan uji asumsi klasik. Ada empat asumsi yang harus dipenuhi yaitu: (1) residu terdistribusi normal, (2) tidak terjadi *heterocedasticity*, (3) tidak terjadi *otokorelasi* dalam residu, dan (4) tidak terjadi *multicollinearity* (Hill, Griffith, dan Judge, 2001). Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ada tidaknya pelanggaran asumsi klasik, analisis data dilakukan dengan melakukan regresi untuk menguji hipotesis.

Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$EDL = \alpha + \beta_1 CG_{it} + \beta_3 KKG_{it} + \beta_2 CG_{it} * \beta_3 KKG_{it} + \beta_4 SIZE_{it} + \beta_5 LeV_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan :

- EDLit : *Environmental Disclosure* yang beredar pada tahun t
- CGit : *Coporate Governance* yang beredar pada tahun t
- KKGit : kepemilikan keluarga, persentase kepemilikan saham keluarga atas jumlah total saham yang beredar pada tahun t
- SIZEit : Ukuran perusahaan yang beredar pada tahun t
- Levit : leverage perusahaan yang beredar pada tahun t
- eit : Error term

**HASIL DAN DISKUSI**

**Statistik Deskriptif**

**Tabel 1**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
EDL	84	0,03	0,57	0,1849	0,19555
CG	84	0,23	0,75	0,5267	0,13474
KKG	84	0,14	0,98	0,5493	0,22391
SIZE	84	4,26	8,33	6,1014	0,78277
LEV	84	0,04	1,40	0,4731	0,24736
Valid N (listwise)	84				

Statistik deskriptif pada tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa tingkat *environmental disclosure* (EDL) dari 28 perusahaan yang dijadikan sampel memiliki nilai rata-rata sebesar 18,49% dengan standar deviasi 19,55%. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat *environmental disclosure* masih rendah. Dengan kata lain, kepedulian dunia bisnis terhadap pelestarian lingkungan hidup masih memprihatinkan (Suharadjanto, 2008).

Tingkat minimal *environmental disclosure* sebesar 3% dimiliki oleh Japfa comfeed indonesia, Tbk; Mulia Industrindo, Tbk; Pyridam Farma, Tbk; Ricy Putra Globalindo, Tbk; Supreme Cable Manufacturing Corporation, Tbk; Sekar Laut, Tbk; SLJ Global, Tbk. *Corporate governance* terendah 23% dimiliki oleh Mulia Industrindo, Tbk. Dilihat dari sisi leverage terendah sebesar 4% dimiliki oleh Jaya Pari Steel, Tbk, sementara tingkat leverage tertinggi dimiliki oleh SLJ Global, Tbk yaitu sebesar 14%. Karakteristik perusahaan yang lain seperti *size* memiliki nilai rata-rata sebesar Rp. 6.1014.000.000, sedangkan nilai minimal dimiliki oleh Indocement Tunggal Prakasa, Tbk. Proporsi kepemilikan keluarga perusahaan rata rata sebesar 54,93%. perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan keluarga sebesar 98% dimiliki oleh Sampoerna, Tbk.

**Hasil Pengujian Regresi**  
**Tabel 2**

Variabel	Coefficient	P-value
Constanta	-0,598	0,062
CG	0,441	0,003*)
KKG	0,040	0,087
CG*KKG	-0,047	0,952
SIZE	0,104	0,000*)
LEV	-0,096	0,266
Adj. R <sup>2</sup>	0,257	
F-statistic	8,522	
Prob (F-statistic)	0,000	

Tingkat signifikansi: \*\*\*) 0,01; \*\*) 0,05; \*) 0,1

Berdasarkan tabel diatas maka persamaan Kepemilikan keluarga memoderasi pengaruh *corporate governance* terhadap *environmental disclosure* sebagai berikut:

$$EDL = \alpha + 0,441CGit + 0,040KKGit - 0,047CGit * KKGit + 0,104SIZEit - 0,096Levit + \epsilon it$$

Berdasarkan tabel tersebut, bahwa koefisien determinasi (*adj.R<sup>2</sup>*) model persamaan regresi sebesar 0,257 atau 25,7%. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen hanya mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen, sebesar 25,7%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diperhitungkan dalam model penelitian tersebut. Nilai probabilita (*F-statistic*) adalah 0,000 atau  $p < 0,005$ . Hal ini berarti variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

**Hipotesis 1: *Corporate governance* berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*.**

Pada hipotesis 1, peneliti menduga bahwa *corporate governance* (CG) akan berpengaruh secara positif terhadap *environmental disclosure* (EDL). Hasil regresi menunjukkan bahwa  $\beta_1$  bernilai 0,441 dengan nilai *p-value* sebesar 0,003, yang berarti hipotesis 1 yang menyatakan CG berpengaruh positif terhadap EDL diterima oleh data empiris, maka hipotesis 1 diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa EDL yang dihasilkan terkandung bukti pengawasan yang dilakukan struktur CG di setiap perusahaan sampel.

Hasil ini di dukung oleh penelitian Katiya dan Agus (2011) menyatakan, Semakin baik *corporate governance* perusahaan, semakin tinggi pula pengungkapan lingkungan yang dilakukan. Menurut Latridis (2012) Perusahaan yang melaporkan kualitas pengungkapan lingkungan yang lebih tinggi cenderung untuk menampilkan *corporate governance* yang efektif. Selanjutnya, Cong dan Freedman (2011) mengatakan terdapat hubungan positif antara *corporate governance* dan *environmental disclosure*.

Penerapan *Corporate governance* dapat dijadikan sebagai infrastruktur pendukung praktik dan *environmental disclosure* karena dapat mengurangi asimetri informasi yang apabila terjadi dapat menimbulkan moral hazard. Dengan demikian *corporate governance* akan bermanfaat dalam mengatur dan mengendalikan perusahaan sehingga menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholders*.

**Hipotesis 2: Kepemilikan keluarga dapat memperlemah pengaruh *corporate governance* terhadap *environmental disclosure*.**

Pada hipotesis 2, peneliti menduga bahwa kepemilikan keluarga dapat memperlemah pengaruh *corporate governance* (CG) terhadap *environmental disclosure* (EDL). Hasil regresi menunjukkan bahwa  $\beta_3$  bernilai -0,047 dengan nilai *p-value* sebesar 0,952, yang berarti hipotesis 2 yang menyatakan Kepemilikan keluarga dapat memperlemah pengaruh *corporate governance* terhadap *environmental disclosure* tidak dapat dibuktikan oleh data empiris,

maka hipotesis 2 ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa EDL yang dihasilkan tidak terkandung bukti pengawasan yang dilakukan struktur CG dan KKG di setiap perusahaan sampel.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan keluarga bukanlah sebagai variabel yang memoderasi (memperkuat/memperlemah) hubungan antara *corporate governance* dengan *environmental disclosure*. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan La Porta *et al.* (1998, 1999 dan 2000) menemukan bahwa struktur kepemilikan yang terkonsentrasi terjadi di negara-negara dengan tingkat *corporate governance* yang rendah. Darmadi dan Solihin (2013) mengatakan bahwa di Indonesia perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga cenderung memiliki insentif yang lebih rendah untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas dalam laporan tahunan mereka. Dalam penelitian Eng dan Mak (2003); Juhmani (2013) mengatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara kepemilikan keluarga dengan pengungkapan sukarela.

## **KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pengolahan data yang diperoleh, hasil pengujian variabel *corporate governance* dengan *environmental disclosure*, dapat diketahui bahwa variabel *corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *environmental disclosure* dengan menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,013 tingkat signifikan sebesar 0,003. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *environmental disclosure*, maka dapat disimpulkan hipotesis 1 dalam penelitian ini diterima.

Berdasarkan hasil pengujian statistika, variabel moderasi yang merupakan interaksi antara *corporate governance* dengan kepemilikan keluarga menghasilkan nilai yang tidak signifikan ( nilai signifikansi  $0,952 > 0,005$ ). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan keluarga bukanlah sebagai variabel yang memoderasi (memperkuat/memperlemah) hubungan antara *corporate governance* dengan *environmental disclosure*.

### **Implikasi**

Penelitian ini masih dapat dikembangkan dengan memperhatikan keterbatasan penelitian dan saran berikut yang dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya, saran tersebut adalah sebagai berikut:

Tingkat *environmental disclosure* di Indonesia yang masih sangat rendah menuntut adanya regulasi yang bersifat mandatory. Perusahaan yang tumbuh dengan pesat selayaknya di dorong oleh pemerintah untuk meningkatkan kontribusinya terhadap upaya pelestarian lingkungan dengan mekanisme *reward and punishment*. Kreditur perlu didorong perannya dalam menciptakan kelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan hidup perlu ditambahkan dalam perijinan kredit. Peran *corporate governance* dalam perusahaan perlu lebih dioptimalkan agar tingkat pengungkapan informasi lingkungan hidup pada *annual report* lebih tinggi. Pemilihan objek penelitian hanya menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2013 saja. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya mungkin dapat mempertimbangkan untuk menggunakan objek penelitian seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI, sehingga dapat dilihat generalisasi teori secara valid. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan sistem manajemen dalam perusahaan manufaktur di Indonesia dimoderasi dengan penelitian tersebut.

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai keterbatasan, Penggunaan variabel *corporate governance* menggunakan indeks. Hasil dari pengisian indeks tersebut subyektif sehingga hasil yang diperoleh belum mencerminkan peran dan implementasi struktur dan mekanisme *corporate*

*governance*. Hasil ini mengambil sampel perusahaan kategori manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini tidak bisa digeneralisir untuk seluruh perusahaan industri manufaktur di Indonesia karena keterbatasan sampel.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A., Chen, T.Y., Radhakrishnan, S. 2007. *Corporate Disclosure by Family Firm*. Journal of Accounting and Economics, 44, 238-286.
- Ahmad, N.N.N. & Sulaiman, M. 2004. *Environmental disclosure in Malaysian annual reports: A legitimacy theory perspective*. IJCM. Vol.14, PP.44-58.
- Anderson, R.C., S.A. Mansi, dan D.M. Reeb. 2002. Founding family ownership and the agency cost of debt journal of financial economics, 68(may):263-285.
- Anderson, K.L., Deli, D.N., Gillan, S.L. 2003. Board of directors, audit committee, and the information content of earnings. Working paper series, university of Delaware.
- Anggraini, R.R. 2006. Pengungkapan informasi sosial dan faktor faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi sosial dalam laporan keuangan tahunan (studi empiris pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar bursa efek Jakarta). Simposium nasional akuntansi IX (Padang).
- Arifin, Z. 2003. Masalah Agensi dan mekanisme kontrol pada perusahaan dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi yang dikontrol keluarga: bukti dari perusahaan publik di Indonesia. Disertasi Pascasarjana FEUI.
- Ball, R., Robin, A., & Wu, J. S. 2000. Incentives Versus Standards: Properties of Accounting Income in four East Asian Countries, and Implications for Acceptance of IAS. *The Bradley Policy Research Center, financial research and policy working paper No. FR 00-04*.
- Classens, S., Djankov, S., & Lang, L.H. 2000. *The separation of Ownership and control in East Asian Corporations*. Journal of Financial Economics 58, 81-112.
- Cong, Yu & Freedman. 2011. *Corporate governance and environmental performance and disclosure*. Advances in accounting, Incorporating Advances in International Accounting. 223-232.
- Deegan, C., dan Brown, N. 1998. *The public disclosure of environmental performance information-a dual test of media agenda setting theory and legitimacy theory*. Accounting, auditing dan accountability journal vol. 9: 52-69.
- Deegan, Craig. 2002. "the legitimizing effect of social and environmental disclosure a theoretical foundation". Accounting, Auditing, and Accountability. Journal vol. 15 No.3, PP. 282-311.
- Deegan, Craig. 2004. "environmental disclosure and share price- a discussion about effort to study this relationship". Accounting forum. Vol 28 PP. 122-136.
- Dynaty, V., Utama, S., Rossieta, H., & Veronica, S. 2012. Pengaruh kepemilikan pengendali akhir terhadap transaksi pihak berelasi.

- Eipstein, M.J. & Freedman, M.1994. *Sosial Disclosure and the Individual investor. Accounting, auditing and accountability journal*, vol. 174, No.4, pp.94-108.
- Eng, L.L., & Jensen, M.C 1983. *Separation of Ownership and Control*. Journal of Law and Economics, Vol. XXVI.
- Global reporting initiatives 2006. “*sustainability reporting guidelines*”, GRI, Boston. Retrieved: 13 Oktober 2006, from [www.global-reporting.org](http://www.global-reporting.org)
- Gray, R., Bebbington, J. Dan Walters, D. 1993. *Accounting for the environment*.ACCA. Hongkong.
- Guthrie, J. Dan Parker, L.D. 1990. “*corporate social disclosure practice: a comparative international analysis*”. Advances in public interest Accounting, 3,159-175.
- Handajani, lilik., dkk. 2010 “ *the effect of earning management and corporate governance mechanism to corporate social responsibility disclosure: study at public companies in indonesia stock exchang*”. Makalah disampaikan pada simposium nasional akuntansi XII, purwokerto.
- Haniffa R.M. & Cooke T.E. 2002. Culture, corporate governance and disclosure in malaysian corporations. Abacus, 38, 317-349.
- Hidayah, erna 2008. Pengaruh kualitas pengungkapan informasi terhadap hubungan antara penerapan corporate governance dengan kinerja perusahaan di bursa efek Jakarta. JAAL volume 12. No. 1, juni 2008.
- Hossain, M., Ahmed, K., & Godfrey, J.M.2005. *Investment Opportunity set and voluntary disclosure of prospective information: a simultaneous equations approach*. Journal of business finance and accounting, 32 (5) and (6), 871-907.
- Jaffar,Romlan.,Mardinah,Dina., dan Ahmad, Azlina. 2013. *Corporate governance and voluntary disclosure practices: evidence from a two tier board systems in indonesia*. Jurnal pengurusan vol.39 :83-92.
- Jensen, M. C., & Meckling, W.H. 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. Journal of financial economics, V.3, No.4, 305-360.
- Juhmani, Omar. 2013.*ownership structure and corporate voluntary disclosure: evidence from bahrain*. *Internasional journal of accounting and financial reporting* vol 3, no 2
- Khomsiyah, 2003. Hubungan corporate governance dan pengungkapan informasi: pengujian secara simultan. Simposium nasional akuntansi VI. Surabaya.
- Khomsiah 2005. “ analisis hubungan indeks and struktur corporate governance terhadap kualitas pengungkapan (an analiysis of the influence of the coorporate governance index and structure on disclosure quality)”, unpublished doctoral disertation, universitas gadjah mada, yogyakarta.

- La porta, R., Lopez-de-Silanes, F., shleifer, A., vishny, R.W. 1999. *Corporate ownership around the world*. Journal of Finance, 54,471-517.
- Lakhal, faten 2004. “*voluntary earning disclosure and corporate governance: evidence from france*.” working paper, institute de recherche en gestion and ESA university paris XII.
- Monks, R.A.G., dan Minow, N. 2003. *Corporate governance 3rd edition*. Blackwell Publishing.
- Morck, R. And Yeung, B 2004, “ *family control and the rent-seeking society*”, entrepreneurship theory and practice, vol. 28 no. 4, pp 391-409.
- Nahda, Katiya., dan Agus harjito, D 2011. Pengaruh *corporate responsibility* terhadap nilai perusahaan dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi. Jurnal siasat bisnis vol 15, No. 1
- Nuryaman. 2009. Pengaruh konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, dan mekanisme corporate governance terhadap pengungkapan sukarela. Jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 6, 1.
- Sekaran, U., Roger B. 2010. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach* (5 th ed.). John Wiley & Sons.
- Suhardjanto, D. & Afni, A.N. 2009. Praktik *corporate social disclosure* di Indonesia studi empiris di bursa efek Indonesia. Jurnal Akuntansi, No.3, Hal 252-264.
- Suhardjanto, Djoko dan Permatasari, Novita, Dian 2010. Pengaruh *corporate governance*, etnis dan latar belakang pendidikan terhadap Environmental disclosure: Studi empiris pada perusahaan listing di bursa efek Indonesia. Kinerja vol 14, No.2.
- Sun, N., Salama, A., Hussainey, K., and Habbash, M. 2010. “*corporate environmental disclosure, corporate governance, and earnings management*”. Managerial auditing journal. Vol.25 no.27 pp 679-700.
- Solomon, J., & Solomon, A. 2004. *Corporate governance and accountability*. England: John Wiley & Sons, Ltd.
- Tsang, E.W.K. 1998. “ *A longitudinal study of corporate social reporting in Singapore: the case of the banking, food and beverages and hotel industries*”. Accounting, auditing & accountability journal, Vol. 11 Issue: 5, pp. 624-635.
- Ujiyantho, Muh. Arief dan Bambang Agus Pramuka. 2007. Mekanisme corporate governance, manajemen laba dan kinerja keuangan. Simposium nasional akuntansi X.
- UU No. 40 tahun 2007  
UU No. 25 tahun 2007  
UU No. 32 Tahun 2009